

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi satu diantara berbagai permasalahan serius yang acap kali dihadapi oleh negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Fenomena ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, mengingat kondisi ini dapat memicu timbulnya berbagai dampak buruk lainnya di negara tersebut. Apabila melihat dari segi ekonomi, kemiskinan dapat menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Novriansyah (2018) yang menyebutkan bahwa “tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa; tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak pada besarnya beban pengeluaran yang harus dibelanjakan untuk melangsungkan pembangunan ekonomi dan berakibat pada terhambatnya pembangunan ekonomi secara tidak langsung”.

Permasalahan kemiskinan berkesinambungan dengan sejauh mana upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut masih belum berhasil. Sebagaimana data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun terakhir.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2020-2024

Sumber: Data BPS yang diolah penulis pada 2024



Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2020-2024

Sumber: Data BPS yang diolah penulis pada 2024

Melalui data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang (bertambah 1,12 juta orang dibanding Maret 2020 yang semula 26,42 juta orang) atau meningkat 0,36% dari yang semula 9,78% menjadi 10,14%. Tahun 2021 menjadi puncak kenaikan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan dampak cukup kuat dari pandemi terhadap perekonomian Indonesia hingga menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Kemudian, pada Maret 2022 tingkat kemiskinan di Indonesia akhirnya mengalami penurunan menjadi 26,16 juta orang (menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021) atau menurun 0,6% dari 10,14% menjadi 9,54%. Penurunan tersebut menjadi awal

pemulihan ekonomi dan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengurangi dampak dari pandemi.

Selanjutnya, pada Maret 2023 populasi penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 25,9 juta orang (turun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022) atau menurun 0,18% dari 9,54% menjadi 9,36%. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada Maret 2024 menjadi 25, 22 juta orang (menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023) atau menurun 0,33% dari 9,36% menjadi 9,03%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sempat mengalami kenaikan akibat pandemi dan kemudian kembali pulih di tahun selanjutnya seiring dengan berakhirnya pandemi, serta membuktikan adanya optimalisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak pandemi bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan

Periode	Penduduk Miskin Perdesaan		Penduduk Miskin Perkotaan	
	Jumlah Orang	Presentase	Jumlah Orang	Presentase
Maret 2020	15,26 juta orang	12,82%	11,16 juta orang	7,38%
Maret 2021	15,37 juta orang	13,10 %	12, 18 juta orang	7,89 %
Maret 2022	14,34 juta orang	12,29 %	11,82 juta orang	7,50 %
Maret 2023	14,16 juta orang	12,22 %	11,74 juta orang	7,29 %
Maret 2024	13,58 juta orang	11,79 %	11,64 juta orang	7,09 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Periode 2020-2024

Akan tetapi, data di atas menunjukkan bahwa bagaimanapun juga perbedaan jumlah kemiskinan antara penduduk perkotaan dan perdesaan masih terjadi, di mana tingkat kemiskinan di perdesaan dari tahun ke tahun lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan perkotaan. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah populasi penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sejumlah 7,09 persen, sedangkan populasi penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sejumlah 11,79 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di perdesaan 4,7 persen

lebih banyak dibanding kemiskinan di perkotaan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Lebih lanjut, cara untuk mengukur ketimpangan yakni menggunakan Gini Ratio dengan skala 0-1 yang menandakan semakin tinggi nilai Gini Ratio maka disparitas yang terjadi juga kian tinggi. Apabila angka yang ditunjukkan semakin kecil, maka menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna. Sebaliknya, jika mendekati angka 1 maka dapat diartikan bahwa kekayaan penduduk tidak terjadi secara merata.

Tabel 1. 2 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2024

38 Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	Per Maret 2024		
Aceh	0.325	0.258	0.294
Sumatera Utara	0.325	0.23	0.297
Sumatera Barat	0.31	0.228	0.283
Riau	0.345	0.267	0.307
Jambi	0.36	0.388	0.321
Sumatera Selatan	0.352	0.305	0.333
Bengkulu	0.413	0.275	0.342
Lampung	0.323	0.275	0.302
Kep. Bangka Belitung	0.263	0.196	0.244
Kep. Riau	0.351	0.24	0.349
DKI Jakarta	0.423	-	0.423
Jawa Barat	0.434	0.325	0.421
Jawa Tengah	0.399	0.31	0.367
DI Yogyakarta	0.44	0.349	0.435
Jawa Timur	0.387	0.325	0.372
Banten	0.357	0.254	0.353
Bali	0.364	0.287	0.361
Nusa Tenggara Barat	0.383	0.326	0.361
Nusa Tenggara Timur	0.281	0.305	0.316
Kalimantan Barat	0.34	0.259	0.31
Kalimantan Tengah	0.311	0.288	0.301
Kalimantan Selatan	0.329	0.255	0.302
Kalimantan Timur	0.325	0.289	0.321
Kalimantan Utara	0.258	0.273	0.264
Sulawesi Utara	0.364	0.334	0.36
Sulawesi Tengah	0.34	0.259	0.301
Sulawesi Selatan	0.373	0.325	0.363
Sulawesi Tenggara	0.392	0.33	0.37
Gorontalo	0.397	0.408	0.414
Sulawesi Barat	0.456	0.303	0.354
Maluku	0.277	0.233	0.282
Maluku Utara	0.343	0.275	0.316
Papua Barat	0.283	0.426	0.389
Papua Barat Daya	0.266	0.413	0.346
Papua	0.299	0.418	0.362

38 Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	Per Maret 2024		
Papua Selatan	0.299	0.435	0.404
Papua Tengah	0.27	0.397	0.381
Papua Pegunungan	0.224	0.346	0.34
Indonesia	0.399	0.306	0.379

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kategori ketimpangan sedang dengan angka 3,79 yang menandakan bahwa kesenjangan ekonomi antar kelompok kaya dan miskin masih tergolong cukup lebar. Di sisi lain, hal tersebut dapat dibuktikan melalui adanya perbandingan antara gini ratio tertinggi pada Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,435 dengan gini ratio terendah pada Kepulauan Bangka Belitung yakni 0,244. Kemudian, Jawa Timur menjadi provinsi yang menempati posisi ke-8 dengan total gini ratio perdesaan dan perkotaan sebesar 0,372. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan yang terjadi pada provinsi Jawa Timur masih tergolong ketimpangan moderat atau sedang.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio wilayah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,387 menunjukkan penurunan sejumlah 0,017 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yakni 0,404. Sementara Gini Ratio wilayah perdesaan pada Maret 2024 sejumlah 0,325 menurun sebesar 0,012 poin dibandingkan Maret 2023 sejumlah 0,337. Namun, meskipun secara keseluruhan gini ratio baik di desa maupun kota mengalami penurunan, apabila dibandingkan antara perdesaan dan perkotaan Gini Ratio di Desa lebih rendah dibanding kota. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan yang terjadi antara perdesaan dan perkotaan.

Berbagai informasi mengenai ketimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan menyeluruh sebagaimana tujuan pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat serta memajukan bangsa dan negaranya untuk mencapai tujuan nasional sesuai pilar pembangunan Indonesia 2045 (Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final, 2019).

Sofhani dalam Hafizh (2024) menyampaikan bahwa:

BANDUNG, itb.ac.id- Menurut Sofhani, pemerataan pembangunan desa dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak berpindah dari desa ke kota. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan orang lebih memilih pindah dari desa ke kota, salah satunya masalah ekonomi. Kota menawarkan kesempatan ekonomi yang lebih baik, pekerjaan yang lebih banyak. Terdapat faktor yang mendorong dan menarik masyarakat desa pindah ke kota disebabkan berbagai kesempatan yang diberikan di kota tersebut. Di sisi lain, hal tersebut disebabkan terbatasnya akses seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga status sosial di kota yang dianggap sebagian orang sebagai hal yang lebih baik”.

Sumber: (<https://itb.ac.id/berita/peran-strategis-desa-dalam-pemerataan-ekonomi/60585>, diakses pada 26 September 2024) (Hafizh, 2024)

Dari fenomena tersebut, perlu adanya langkah strategis oleh pemerintah melalui pemerataan pembangunan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi, baik dari segi miskin dan kaya maupun dari segi pendapatan antara penduduk desa dan kota guna. Program pembangunan di desa perlu menjadi perhatian penting mengingat mayoritas masyarakat miskin di Indonesia bermukim di desa sehingga perlu mendapatkan pembangunan yang merata pula. Sebagaimana pernyataan Bintarto dalam lama *indonesiana.id*.

Indonesiana.id: Menurut Bintarto, desa dapat didefinisikan sebagai perwujudan dari kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural pada suatu daerah yang secara timbal balik memiliki hubungan dan

pengaruh dengan daerah lain. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan di Indonesia juga harus memperhatikan pembangunan terhadap desa, mengingat desa merupakan salah satu komponen pembangunan negara Indonesia, sehingga dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan kemakmuran dalam pembangunan tidak akan mudah jika desa tidak disertakan dalam sasaran Pembangunan.

Sumber: (<https://www.indonesiana.id/read/129048/realitas-pembangunan-desadi-indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2024) (Febrina, 2019).

Lebih lanjut, pemerintah merespon permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan yang dapat mendorong kemandirian desa dalam mengelola keunggulan dan Sumber Daya Alam yang ada di setiap desa, serta memberikan peluang bagi kemampuan daerah tersebut yang salah satunya dapat dicapai lewat pengembangan kawasan perdesaan melalui pemberdayaan untuk meningkatkan keragaman usaha desa serta mengoptimalkan sumber daya yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi desa guna memberi peluang bagi desa dan daerah yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.

Kebijakan yang dimaksud pada pernyataan di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “tujuan dari Pembangunan Desa yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi adanya kesenjangan sosial ekonomi melalui pembangunan sarana prasarana Desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Tahapan Pembangunan Desa meliputi perencanaan yang disusun sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa sesuai perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pelaksanaan, dan pengawasan”. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak

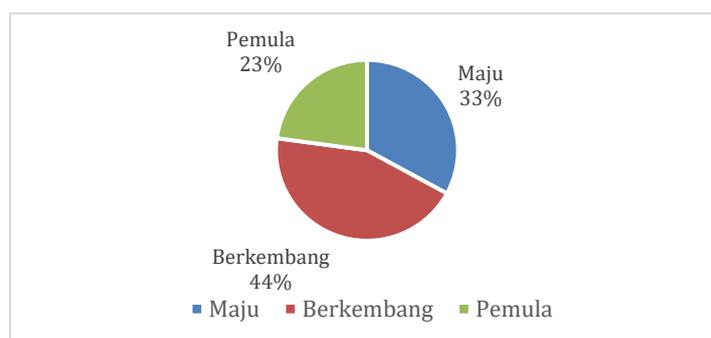
seterusnya bergantung pada program yang diberikan pemerintah, sehingga dapat beranjak menuju kehidupan yang lebih baik (Ifa, 2023).

Sementara itu, Sumodiningrat dalam Putra et al. (2020) menyebutkan “terdapat indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yakni jumlah penduduk miskin yang berkurang dan kapasitas masyarakat meningkat serta pendapatan yang merata”. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan membangun sebuah lembaga yang memiliki basis ekonomi pada warga desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna terciptanya iklim baru bagi perekonomian desa.

Legalitas badan usaha tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BUM Desa merupakan lembaga yang secara mandiri dikelola oleh desa, di mana pengelolaannya dibantu oleh masyarakat dan perangkat desa serta menjadi pondasi pada aktivitas ekonomi perdesaan yang berkedudukan sebagai lembaga komersial dan sosial. BUM Desa diharapkan dapat menjalankan jasa pelayanan umum dan usaha ekonomi secara mandiri yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat desa.

Jumlah BUM Desa di Indonesia hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 60.980 BUM Desa. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,923% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 60.417 BUM Desa. Dari total tersebut 22.457 diantaranya sudah memiliki badan hukum dan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 26,27% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 16.558 sebagaimana data dalam laman <https://sid.kemendes.go.id> yang mencatat total BUM Desa secara nasional yakni 60.980 BUM Desa, terdiri dari 55.068 BUM Desa dan 5.912 BUM Desa Bersama (Kementerian Desa, 2024).

Sementara itu, pada provinsi terbesar kedua di Pulau Jawa yakni Jawa Timur, pemerintah di provinsi tersebut telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan *new centre of growth* perekonomian provinsi di masa depan, salah satunya melalui kebijakan pendirian BUM Desa.



Gambar 1. 1 Klasifikasi BUM Desa di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: *datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id*

Berdasarkan data *Desa Center* Jawa Timur, pada tahun 2024 telah terbentuk 6.750 BUM Desa di Jawa Timur yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya 2.223 BUM Desa dengan klasifikasi maju, 2.984 BUM Desa klasifikasi berkembang, dan 1.543 BUM Desa klasifikasi pemula. Upaya tersebut menghasilkan manfaat bagi berbagai kota/kabupaten di Indonesia, dibuktikan

dengan menurunnya desa tertinggal dengan jumlah 344 desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2019-2021, sehingga pada 2021 provinsi tersebut dapat terlepas dari adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Data tersebut diperkuat dengan pernyataan Adhy Karyono selaku Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur bahwa:

Antarnews.com: Pemprov Jatim terus mendorong kemajuan desa dengan berbagai cara karena ke depannya desa akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan *new centre of growth* perekonomian provinsi di masa depan. Bahkan di 2024, Jatim mencapai jumlah desa mandiri tertinggi nasional, dengan jumlah 2.800 desa.

Sumber: (<https://www.antarnews.com/berita/4202859/pj-gubernur-jatim-optimistis-desa-akan-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 16 Oktober 2024) (Solichah, 2024).

Akan tetapi, faktanya belum semua desa di Provinsi Jawa Timur mempunyai BUM Desa yang secara maksimal dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya mengembangkan suatu BUM Desa tidak semudah yang dibayangkan. Syncore (2017) dalam (Harto & Riwandari, 2018) menyebutkan bahwa “terdapat beberapa persoalan yang acap kali terjadi yakni terkait kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam merencanakan, mengembangkan produk maupun memasarkan dan mencatat keuangan sesuai standar yang masih kurang. Permasalahan tersebut seperti adanya kesalahan dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dengan jenis usaha yang dipilih, serta kemampuan dan kesiapan SDM yang dirasa belum optimal dalam pengelolaan administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Di sisi lain, minimnya pengalokasian modal BUM Desa dari dana desa serta pemeriksaan laporan keuangan dan evaluasi kinerja yang belum maksimal juga menjadi problem yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDesa”.

Faktor lain yang berpotensi menyebabkan timbulnya tantangan tersebut yakni keterbatasan inovasi dalam program BUM Desa. Fitriani et al. (2024) dalam jurnalnya menjelaskan terkait faktor lain yang menyebabkan timbulnya tantangan dalam pengelolaan BUM Desa “sebagaimana UMKM di negara berkembang, BUM Desa acap kali menghadapi kendala seperti sumberdaya yang terbatas, kurang memadainya infrastruktur dan kemampuan teknologi yang tidak memadai sehingga dapat menjadi penghambat kemajuan BUM Desa. Di sisi lain, meskipun inovasi penting untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan perolehan pendapatan, tanpa upaya yang terfokus untuk meningkatkan inovasi teknologi, program ini mungkin akan terus menghadapi masalah dalam jangka waktu panjang”. Dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya tindak lanjut agar pelaksanaan BUMDesa dapat berjalan maksimal sebagaimana mestinya.

Kabupaten Sidoarjo menjadi satu diantara wilayah lain di Jawa Timur yang perekonomian desanya masih bergantung pada BUM Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diperbarui tahun 2024, Desa/Kelurahan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tercatat sejumlah 346 desa. Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencatat bahwa diantara keseluruhan jumlah desa yang ada, jumlah BUM Desa yang tercatat aktif yakni sejumlah 259 unit. Di sisi lain, terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang telah membangun BUM Desa pada masing-masing desanya, salah satunya yakni Kecamatan Wonoayu dengan total BUM Desa 23 unit dari 23 desa, hal tersebut dilihat dari data Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Jumlah BUM Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah BUM Desa
1.	Tarik	20	18
2.	Prambon	20	16
3.	Krembung	19	15
4.	Porong	15	11
5.	Jabon	13	13
6.	Tanggulangin	18	11
7.	Candi	24	24
8.	Tulangan	22	14
9.	Wonoayu	23	23
10.	Sukodono	19	14
11.	Sidoarjo	24	10
12.	Buduran	15	6
13.	Sedati	16	13
14.	Waru	17	17
15.	Gedangan	15	11
16.	Taman	24	11
17.	Krian	22	17
18.	Balongbendo	20	15
Kabupaten Sidoarjo		346	259

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Selain itu, berdasarkan klasifikasi menurut tingkatan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023, Kecamatan Wonoayu memiliki desa dengan kategori maju terbanyak dibanding kecamatan lain yakni sejumlah 18 desa dan 5 desa sisanya tergolong kategori mandiri (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2024a). Sementara berdasarkan klasifikasi BUM Desa yakni maju, berkembang, dan pemula, salah satu BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam kategori pemula yakni BUM Desa “Sumber Makmur” yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. BUM Desa tersebut termasuk dalam kategori pemula dikarenakan adanya BUM Desa tersebut terbilang masih baru yang diresmikan pada 27 Agustus 2023 oleh Bupati Sidoarjo.

Sidoarjo.inews.id: Ya, berdirinya BUMDes yang diresmikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Minggu (27/8/2023) itu diharapkan mengajak masyarakat dalam membangun perekonomian desa,

mengembangkan UMKM masyarakat melalui potensi lokal serta meningkatkan pendapatan desa.

Sumber: (<https://sidoarjo.inews.id/read/338713/melihat-bisnis-bumdes-sumberejo-yang-diresmikan-bupati-sidoarjo>), diakses pada 16 Oktober 2024). (Zulkarnain, 2023).

Melalui pendirian BUM Desa “Sumber Makmur”, diharapkan dapat mewujudkan perekonomian tingkat desa khususnya bagi Desa Sumberejo secara berkelanjutan. Selain itu, dengan berdirinya BUM Desa juga diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi bagi warga Desa Sumberejo dan menjadi motor penggerak perekonomian desa yang dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi warga. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Gus Mudhlor dalam laman *antarajatim*:

Bupati Sidoarjo saat itu mengatakan bahwa keberadaan BUMDes jangan hanya sekedar didirikan namun hilang, tapi wajib jadi BUMDes yang mampu menyejahterakan warganya baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Seperti nama BUMDes ini adalah Sumber Makmur semoga membawa kemakmuran untuk warganya. Beliau berpesan agar dilaksanakan dengan baik, transparansinya jalan, dan yang terpenting adalah dari, oleh, dan untuk warga Sumberejo.

Sumber: (<https://jatim.antaranews.com/berita/727095/bupati-sidoarjo-bumdes-harus-wujudkan-ekonomi-desa-berkelanjutan>), diakses pada 30 Oktober 2024) (Setiawan, 2023).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sumberejo Sahar Maulana dalam wawancara pra riset pada 12 September 2024, BUM Desa “Sumber Makmur” didirikan melalui dua tahap pembangunan, mulai dari kepala desa sebelumnya, dan dilanjutkan hingga selesai oleh kepala desa saat ini yaitu Bapak Sahar Maulana. Modal dari Pembangunan BUM Desa tersebut berasal dari dana desa Sumberejo sendiri. Bapak Sahar juga menambahkan bahwa didirikannya BUM Desa “Sumber Makmur” ini bermula dari adanya aspirasi masyarakat yang kemudian dimusyawarahkan dalam kinerja pengurus BUM Desa. Selain itu, beliau juga

menyatakan bahwa BUM Desa tersebut didirikan dengan tujuan menyatukan para warga yang kebanyakan menjual makanan seperti rujak, pecel, dan makanan lainnya dalam satu wilayah. Pembangunan BUM Desa “Sumber Makmur” dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dan menelan anggaran sebesar Rp. 600 juta.

“Sebelumnya, BUM Desa ini didirikan melalui dua tahap pembangunan, mulai dari Kades sebelum saya dan dilanjutkan di masa jabatan saya sampai diresmikan Bupati Sidoarjo. Kalau modalnya ya dari desa sendiri, kemudian dikelola sampai bisa terbentuk BUM Desa ini. Tujuan saya membangun BUM Desa ini karena saya melihat banyak orang berjualan di sini, mulai dari jualan rujak, pecel, sego (nasi) lenthos, sehingga rencananya akan saya jadikan satu semuanya di lokasi ini. Anggaran pembangunannya sendiri kemarin habis sekitar 600 juta untuk pendirian BUM Desa ini”.

Lebih lanjut, Bu Eka selaku Kepala Urusan Perencanaan di Desa Sumberejo menambahkan bahwa terkait pengelolaan BUM Desa ini mulanya dilakukan dengan memberdayakan ibu-ibu kader melalui pemberian stan dengan sistem bagi hasil, di mana setiap porsi makanan atau minuman yang dijual akan memberikan sumbangsih sebesar seribu rupiah ke BUM Desa. Seiring berjalannya waktu, BUM Desa “Sumber Makmur” membuat pembaharuan dan berhasil mendirikan 3 unit usaha dengan fasilitas yang mampu mendukung kegiatan masyarakat.

Pertama, BUM Desa “Sumber Makmur” membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk dimanfaatkan sebagai wadah bagi masyarakat Desa Sumberejo dalam mengelola sampah. Sumber pemasukan TPST sendiri berasal dari biaya yang dibayarkan per keluarga sebesar Rp. 25.000,00 tiap bulannya. Melalui TPST tersebut pemerintah desa berupaya memberikan fasilitas kepada masyarakat terlebih dengan adanya penambahan tungku untuk mempermudah dalam mengolah sampah, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke TPA dan tidak perlu

bingung untuk membuang sampah karena sudah dikelola BUM Desa, mulai dari pengambilan sampah hingga pengiriman menuju TPA. BUM Desa “Sumber Makmur”

Kedua, terdapat unit UMKM melalui pendirian pujasera (pusat jajanan serba ada) yang terdiri dari 9 stand yang menjual makanan mulai dari tahu campur, rujak, gado-gado, nasi rawon, nasi pecel, lontong kikil, seblak, dan sego lento, serta aneka minuman seperti kopi dan berbagai jus buah. Kemudian, terdapat 5 stand kios yang disewakan. Kios-kios yang ada terdiri dari toko sembako, toko tani, serta terdapat toko yang menjual aksesoris HP dan pulsa. Unit pujasera dan kios ini terletak di lokasi yang strategis di antara persawahan yang mudah dijangkau oleh para pengguna jalan serta menawarkan konsep modern dengan fasilitas yang tidak kalah menarik dengan café-café saat ini, seperti musholla, tongkrongan di tengah taman, spot foto, hingga tempat untuk hajatan.

Ketiga, BUM Desa “Sumber Makmur” memberikan fasilitas sarana olahraga bagi masyarakat berupa lapangan desa yang luas untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan baik bagi warga Desa Sumberejo sendiri maupun bagi masyarakat luar desa tersebut. Melalui adanya fasilitas tersebut masyarakat desa terlebih para pemuda yang ingin berolahraga tidak perlu bingung mencari lapangan. Lebih lanjut, Bum Desa “Sumber Makmur” telah membentuk struktur pengurus dengan total 10 SDM yang pengelolanya merupakan warga Desa Sumberejo sendiri guna mempermudah dalam pengelolaan BUM Desa yang tercantum dalam table di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jumlah SDM Pengelola BUM Desa “Sumber Makmur”

No	Jabatan	Jumlah
1	Penasihat BUM Desa	1
2	Ketua Dewan Pengawas	1
3	Pengawas BUM Desa	2
4	Direktur BUM Desa	1
5	Sekretaris BUM Desa	1
6	Bendahara BUM Desa	1
7	Kepala Unit Pujasera	1
8	Kepala Unit TPST	1
9	Kepala Unit Lapangan	1
TOTAL		10 SDM

Sumber: Data BUM Desa “Sumber Makmur” (2025)

Penjelasan di atas sejalan dengan observasi pra penelitian oleh penulis dan pernyataan Bu Eka Lukitasari selaku Kepala Urusan Perencanaan di Desa Sumberejo dalam wawancara pra penelitian pada 18 September 2024.

“Jadi awal mulanya, di Sumberejo ini kan banyak kader yang terdiri dari ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu kita berdayakan, kita kasih stan dengan sistem bagi hasil bukan sewa. Bagi hasil ini setiap porsi makanan atau minuman yang dijual, itu sumbangsihnya ke BUM Desa sebesar seribu rupiah, tapi itu beda dengan biaya operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, BUM Desa di Desa Sumberejo ini melakukan penambahan unit usaha, dan sekarang unit usaha tersebut terdiri dari beberapa bidang, yang pertama bidang UMKM dengan adanya pusat jajanan serba ada (pujasera) berjumlah 9 unit yang menjual berbagai minuman dan makanan mulai dari gado-gado, pecel, rawon, kikil, seblak, sego lento, rujak, sampai nasi campur ada. Kalau minumannya ada kopi sama jus buah. Kemudian, di samping pujasera itu ada 5 stand toko untuk pelaku ekonomi yang mau berjualan di BUM Desa dengan sistem sewa, ada toko sembako, toko pulsa, dan toko perlengkapan untuk bertani. Selain itu, kami menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa dengan harapan masyarakat tidak kesusahan membuang sampah, kita fasilitasi mulai dari pengambilan sampahnya sampai pengiriman ke TPA, dengan sistem pembayaran setiap bulannya oleh setiap keluarga sebesar Rp. 25.000,00. Terakhir kita menyewakan fasilitas desa berupa lapangan yang biasa digunakan untuk warga sekitar terutama anak muda bermain bola. Masing-masing unit itu juga dikelolanya sama warga desa sendiri dan sudah kami beri fasilitas yang memadai semaksimal mungkin supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Untuk memudahkan pengelolaan, kita juga sudah membentuk struktur pengelola BUM Desa keseluruhan ada 10 orang”.

Keberadaan BUM Desa “Sumber Makmur” hendaknya terus dikelola dan dikembangkan agar tujuan pendirian BUM Desa tersebut dapat tercapai. Namun,

pada prosesnya masih ditemui adanya hambatan atau permasalahan yang menyebabkan pengembangan BUM Desa belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, belum semua sektor BUM Desa mampu berkembang dan berjalan secara optimal dalam memberikan kontribusi besar bagi perekonomian desa. BUM Desa yang terus beroperasi hingga saat ini adalah unit TPST dan lapangan desa, sementara unit pujasera dan kios mulai mengalami penurunan akibat sepi pengunjung sehingga para pedagang memilih berhenti. Akan tetapi, meskipun tiga unit tersebut tetap beroperasi, ketiganya belum dapat berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, masyarakat sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas TPST karena masyarakat merasa terbantu dalam memudahkan urusan persampahan, namun belum semua masyarakat turut serta dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait unit TPS. Selain itu, lapangan desa yang disewakan juga terus berjalan, namun apabila tidak ada warga yang sewa lapangan maka berdampak pada tidak adanya pemasukan.

Hambatan tersebut dapat terjadi apabila pengelolaan BUM Desa tidak dilaksanakan secara maksimal, mulai dari kemampuan dan kesiapan SDM dalam mengelola BUM Desa yang belum optimal, inovasi yang masih terbatas, serta kurangnya pengoptimalan dalam menggunakan teknologi yang ada. Selain itu, ancaman dari luar BUM Desa seperti adanya pesaing dan kurangnya popularitas BUM Desa di khalayak luas juga menjadi penghambat berkembangnya BUM Desa. Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan BUM Desa agar mampu berkembang secara optimal. Penjelasan tersebut sebagaimana hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak

Samsul Huda selaku Direktur BUM Desa “Sumber Makmur” dan Ibu Eka pada 3

Maret 2025

“BUM Desa yang masih terus berjalan hingga saat ini Cuma TPST, kios sama lapangan desa saja. Masyarakat sudah banyak yang ikut memanfaatkan fasilitas TPST ini, tetapi ya belum maksimal karena belum semua masyarakat yang ikut. Beberapa masyarakat belum mengetahui unit TPST ini karena kita juga belum mengadakan sosialisasi. Kemudian, persewaan lapangan juga sudah berjalan, tapi juga belum maksimal karena kalau tidak ada pengunjung ya tidak ada pemasukan. Kios yang disewakan juga sudah terisi semua, tapi belum terlalu ramai. Kalau pujaseranya belum terlalu berkembang, karena hingga saat ini pujaseranya justru sepi pengunjung, sehingga para penjualnya pun memilih untuk berhenti berjualan padahal fasilitas yang kami berikan sudah sangat memadai”.

“Menjalankan usaha pastinya butuh kemampuan yang mumpuni juga terutama terkait jual beli, sedangkan para pengurus BUM Desa juga basicnya bukan penjual atau berdagang, jadi ya kemampuan SDM nya masih terbatas dan perlu untuk ada pelatihan dan pengawasan. Kemudian, kurangnya pengunjung yang datang ke pujasera BUM Desa bisa terjadi karena pihak BUM Desa tidak melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, sehingga keberadaan pujasera ini belum diketahui masyarakat di luar Desa Sumberejo. Penjual dari luar BUM Desa yang lebih beragam dan dikenal khalayak luas atau viral juga jadi kekhawatiran kami khususnya terhadap keberadaan unit pujasera dan kios”.

Kemudian, Bapak Asyari Dwi Arifianto selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada 14 Oktober 2024 dalam wawancara pra penelitian juga menambahkan bahwa belum berkembangnya BUM Desa “Sumber Makmur” menjadikan para pengelola BUM Desa bersama pemerintah desa berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada untuk dapat disempurnakan nantinya.

“Kami sudah merencanakan adanya pertemuan seluruh pengurus BUM Desa untuk musyawarah terkait bagaimana BUM Desa kedepannya, mulai dari peningkatan kapasitas pengurus, menggali potensi desa untuk disesuaikan sama BUM Desa nya nanti, dan kita juga sedang mengurus pengajuan terkait badan hukum. Harapannya nanti BUM Desa ini bisa terus berkembang dalam jangka waktu panjang dan ngga berhenti di situ aja, jadi masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.”.

Melalui pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa saat ini BUM Desa Sumber Makmur masih berada pada fase penyesuaian sehingga banyak hambatan atau persoalan dalam pengelolaannya yang menunjukkan bahwa BUM Desa tersebut memang masih dalam tahap baru merintis. Menanggapi hal tersebut, pihak BUM Desa “Sumber Makmur” telah merencanakan untuk melakukan perbaikan dalam pengembangan BUM Desa tersebut, sehingga diperlukan adanya riset terkait strategi yang sesuai dalam melaksanakan upaya tersebut.

“Sampai saat ini, belum ada yang penelitian tentang BUM Desa ini sih mbak, termasuk yang membahas tentang bagaimana strategi pengembangan yang cocok diterapkan di BUM Desa Sumber Makmur. Kalau mengharapkan dari warga desanya sendiri juga rasanya kurang memungkinkan karena pengetahuan mereka terbatas, jadi saya harap ya memang ada penelitian yang membahas pengembangan BUM Desa Sumber Makmur ini sebagai acuan kami nantinya”.

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan dalam menganalisis faktor pendukung dan menghambat upaya pengembangan suatu desa. Berdasarkan Penelitian Widiastuti & Nurhayati (2019), dalam mengembangkan suatu desa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tersebut, diantaranya keberagaman potensi desa seperti potensi lingkungan dan ekonomi. Tak hanya itu, dalam memajukan desa perlu adanya dukungan dari masyarakat desa dan pemerintah desa. Di sisi lain, perkembangan desa dapat terhambat diakibatkan konflik kepentingan warga dan pemerintah desa, sehingga berdampak pada gagalnya berbagai program pengembangan desa.

Sementara itu, hasil penelitian Pradini (2020) memberikan penjelasan mengenai pengaruh dari strategi yang nampak serta berdampak besar bagi berkembangnya BUM Desa yakni strategi ekspansif, diantaranya lokasi strategis,

peningkatan kinerja pengelola, mengencarkan kegiatan yang melibatkan partisipasi warga, berkontribusi pembangunan desa, dan mengembangkan unit usaha melalui pemanfaatan potensi pasar. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi yang beragam, sehingga baik faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pengembangan BUM Desa pun kemungkinan bervariasi menyesuaikan ciri khas setiap desa.

Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada identifikasi faktor penghambat dan pendukung dari segi internal maupun eksternal dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sumber Makmur di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo untuk kemudian dirumuskan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sumber Makmur. Penulis melakukan analisis menggunakan indikator pada analisis SWOT menurut Rangkuti dalam (Pradini, 2020) dengan mempertimbangkan kesesuaian tujuan penelitian, ketepatan dengan variabel, dan paling mendekati kondisi yang sebenarnya terjadi di BUM Desa “Sumber Makmur”.

Dari berbagai kondisi yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa BUM Desa “Sumber Makmur” merupakan BUM Desa pemula di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang hingga saat ini belum dapat berkembang secara optimal dalam menjalankan prosesnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya hambatan yang dihadapi dan berdampak pada belum tercapainya realisasi dari tujuan pendirian BUM Desa serta manfaat yang belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Di sisi lain, pihak pengelola BUM

Desa masih terkendala dalam merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan BUM Desa, mengingat adanya terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan riset, serta belum adanya penelitian yang membahas mengenai strategi pengembangan BUM Desa “Sumber Makmur”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan strategi pengembangan yang tepat bagi BUM Desa “Sumber Makmur” melalui pendekatan analisis SWOT, agar keberadaan BUM Desa dapat lebih berdaya guna, mandiri, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa. Menanggapi hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Sumber Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai berbagai data dan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana strategi pengembangan BUM Desa “Sumber Makmur” di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi pengembangan yang tepat untuk dilakukan BUM Desa “Sumber Makmur” di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, diantaranya.

1. Manfaat Teoritis

- (a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan literatur peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang sejenis, serta dapat menambah bacaan ilmiah di perpustakaan terlebih pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.
- (b) Untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan unit perekonomian di desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

2. Manfaat Praktis

(a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai strategi pengembangan BUM Desa, serta menjadi menjadi sarana penerapan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik

(b) Bagi Badan Usaha Milik Desa “Sumber Makmur”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan yang bermanfaat dalam proses perumusan strategi pengembangan BUM Desa dengan tujuan untuk mendotoang pengembangan lebih lanjut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan Keputusan agar BUM Desa “Sumber Makmur” dapat lebih optimal dalam menjalankan strategi pengembangan pada masing-masing unit usahanya.

(c) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai penunjang kegiatan akademik, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis di

masa mendatang, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas.